

## SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS: PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI DAN NORMA PANCASILA

### A PHILOSOPHICAL STUDY: CHARACTER EDUCATION BASED ON PANCASILA VALUES AND NORMS

Yulius Rustan Effendi

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Email: efenrust@unikama.ac.id

#### Info Artikel

##### Riwayat Artikel:

Diterima:

21 Juni 2023

Disetujui:

22 Juli 2023

##### Kata Kunci:

*karakter nasionalis;  
nilai dan norma  
Pancasila; pendidikan  
karakter; peserta didik*

#### Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan nilai-nilai karakter nasionalisme yang berpedoman pada nilai-nilai dan norma Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengumpulan data menggunakan metode *systematic review* (meta-sintesis) yang diperoleh dari data digital melalui kajian analisis studi meta-etnografi. Kajian studi model meta-etnografi diterapkan dalam wahana “interpretatif” pendalaman studi utama untuk menghubungkan konsep pendidikan karakter nasionalis dalam kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Peneliti melakukan penelusuran data iterative dalam membedah dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat Pancasila. Melalui pendekatan interpretatif, penulis mendeskripsikan pengembangan penerapan pendidikan karakter nasionalisme peserta didik yang berlandaskan pada nilai-nilai dan penghayatan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila yang belum diterapkan secara maksimal di lingkungan sekolah. Selain itu, penulis mengembangkan studi primer untuk membedah konsep Pancasila dalam jejaring pemaknaan filosofis dalam memaknai arti kehidupan yang perlu dihayati peserta didik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila perlu kembali ditegakkan dan ditempatkan dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara dalam memperkokoh dan menggugat dimensi epistemologis Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan pada tataran global sebagai pengejawantahan nilai kebinekaan global.

#### Article Info

##### Article History

Received:

June 21, 2023

Approved:

July 22, 2023

#### Abstract

This study aims to analyze the urgency of implementing the values of nationalism as guided by Pancasila values and norms as a philosophical system for character education. The data collection employs the systematic review method (meta-synthesis) obtained from digital sources by analyzing meta-

**Keywords:**

*nationalist character; Pancasila values and norms; character education; students*

ethnographic studies. The study applies the meta-ethnographic model to the "interpretative" platform to deepen the primary study's concepts related to national character education within the context of Pancasila as a philosophical system. The researcher conducts iterative data research to dissect the ontological, epistemological, and axiological dimensions of Pancasila philosophy. Through an interpretative approach, the author describes the development of implementing character education with nationalism principles for students based on the values and understanding of norms contained in Pancasila, which have not been maximally applied within the school environment. Additionally, the author develops a primary study to examine the concept of Pancasila within a network of philosophical meanings to comprehend the significance of life that students should internalize. The study's findings indicate the need to re-establish and position Pancasila as the foundation of the nation, strengthening and questioning the epistemological dimensions of Pancasila, not only intended for Indonesia but also at the global level as an embodiment of global diversity values.

**PENDAHULUAN**

Penguatan karakter melalui program pendidikan nasional telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan sejak tahun 2010. Revitalisasi kebijakan program pendidikan nasional termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017, yang mempertegas kembali pentingnya pendidikan karakter. Aturan tersebut menyatakan bahwa "Program penguatan pendidikan karakter merupakan aktivitas pedagogis yang menyatukan hati, rasa, pikiran, dan tubuh serta dijalankan melalui kerja sama antara komponen internal sekolah, orangtua, dan masyarakat seiring dengan dorongan membentuk mental melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental". Klausul peraturan ini wajib ditanggapi oleh sekolah-sekolah dengan melakukan koordinasi intensif bersama seluruh pemangku kepentingan sekolah, termasuk peran pemimpin sekolah (Koesoema, 2015; Effendi, 2020). Akan tetapi, revitalisasi kebijakan ini belum terlaksana secara optimal di sekolah-sekolah. Ada beberapa penyebab gagalnya sekolah melaksanakan kegiatan pembentukan karakter.

*Pertama*, penentuan aspek penanaman karakter bersifat ambigu karena nilai-nilai karakter bersifat universal. Penanaman karakter ada yang berlandaskan nilai-nilai budaya nasional, tetapi tidak fokus pada pembentukan karakter nasionalisme khususnya yang berakar pada jiwa dan filosofi Pancasila (Effendi, 2020; Arafat, 2021). Budaya nasional yang didengungkan sebagai pemersatu masih bersifat ambigu, karena persatuan secara budaya merupakan pemahaman yang keliru. Karena itu, jika persatuan secara budaya, maka persatuan kebudayaan itu hendaknya terikat dan berkibat pada nilai-nilai dan norma-norma Pancasila (Kleden, 1987; Effendi, 2021). Karena itu, penghayatan nilai-nilai budaya nasional dalam pendidikan karakter, sangat relevan dengan visi-misi, tujuan penanaman semangat Pancasila untuk membentuk dan memupuk karakter peserta didik berbasis pemaknaan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Arah pedagogisnya terfokus pada

pemahaman dan penghayatan jiwa Pancasila dan klausul UUD 1945 dalam hidup sehari-hari sebagai wujud kesadaran dan tanggung jawab warga negara (Aryani et al., 2022; Ida et al., 2022).

*Kedua*, kepala sekolah belum menemukan pola pendekatan yang relevan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter (Effendi & Sahertian, 2022). Akibatnya, sekolah mengalami ambiguitas dalam mendesain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan sehingga sekolah belum memiliki panduan pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Selain itu, tidak adanya keseragaman penyusunan model perangkat pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran berkarakter oleh para guru di kelas juga menghambat terbentuknya karakter peserta didik yang berwawasan nasionalisme. Ida et al. (2022) menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan falsafah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, tidak hanya menekankan konsep baku dan bernilai dogmatis, tetapi perlu memiliki standar metode yang dapat dipahami seluruh lapisan masyarakat sehingga perlu menjadi *core value* dalam membelajarkan karakter.

Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa pembentukan kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila akan menjadi pembelajaran yang bermakna manakala perkembangan kepribadian terarah pada pembentukan sikap religius, sosial, kemandirian, nasionalisme, demokratis dan berwawasan toleransi untuk menghargai perbedaan (Aryani et al., 2022). Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa yang beriman, bersikap dan berperilaku sesuai norma kehidupan masyarakat, serta mengantarkan mahasiswa menjadi warga Negara Indonesia yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila (Arafat, 2021; Al Inu & Dewi, 2021). Temuan-temuan ini menunjukkan adanya ketidaksinambungan antara konsep dengan praktik pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Menanggapi belum optimalnya pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai dan norma-norma Pancasila, secara khusus kajian ini berupaya mendeskripsikan pengembangan aspek filosofis yang mencakup dimensi ontologis, epistemologis dan aksiologis Pancasila sebagai landasan pembentukan karakter nasionalis peserta didik di sekolah.

## METODE

Kajian ini menerapkan pendekatan yang bersifat *systematic review* dengan menyintesis dan menyatukan setiap pemikiran hasil temuan penelitian dalam bentuk data deskriptif kualitatif yang holistik (Perry & Hammond, 2002) untuk membedah pemaknaan filosofis penjabaran jiwa Pancasila yang mengarah pada pembentukan karakter nasionalis peserta didik di lingkungan sekolah. Pembedahan studi melalui pendekatan metode ini berlandaskan proses merangkum hasil temuan penelitian kualitatif terdahulu yang dikaji dalam konteks meta-sintesis. Pengumpulan data menggunakan metode *systematic review* (meta-sintesis) yang diperoleh dari data digital melalui penelusuran data yang terfokus pada telaahan meta-etnografi. Telaahan metode meta-etnografi diperdalam dalam penelusuran studi interpretatif dalam analisis pembedahan studi primer secara mendalam untuk menemukan studi-studi yang terfokus pada nilai-nilai karakter nasionalis dalam kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Penelusuran data lebih lanjut melalui proses kajian interpretatif, dengan menerapkan teknik yang menyebar dalam studi iteratif. Analisis iteratif pemaknaan filosofis Pancasila menekankan penjabaran nilai-nilai praktis Pancasila dalam kandungan telaahan dimensi ontologis, epistemologi dan aksiologi.

Penelusuran studi berbasis pendekatan metode sintesis dilaksanakan dalam beberapa tahapan kajian yaitu: (1) melakukan identifikasi studi primer yang menemukan basis nilai-nilai nasionalisme yang memberi pemaknaan penguatan karakter berbasis nilai-nilai dan norma Pancasila, berdasarkan penjabaran dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologi; (2) melakukan studi banding hasil temuan penelitian sebelumnya terhadap tema yang terdapat dalam satu artikel dengan membandingkan hasil temuan pada artikel lain, yang memberi penekanan pada internalisasi konsep nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran untuk diaktualisasi melalui tindakan praksis pada perilaku hidup sehari-hari; (3) mengembangkan konsep baru berdasarkan fakta empiris, penerapan pemaknaan terhadap penghayatan nilai-nilai nasionalisme untuk membentuk karakter melalui proses pendidikan yang berkiblat pada jiwa dan semangat Pancasila; (4) mengonstruksi kerangka baru penerapan nilai-nilai nasionalisme dengan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam satu kesatuan yang membentuk karakter peserta didik; (5) melakukan reinterpretasi hasil temuan data primer untuk dihubungkan dengan tindakan praksis penerapan nilai-nilai dan norma Pancasila dalam membentuk karakter nasionalis peserta didik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penguatan Karakter Nasionalisme Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Pemaknaan pendidikan yang berkarakter holistik dipertegas melalui adagium pedagogis yang pernah dikemukakan oleh Saneca, filsuf abad III sebelum Masehi, *non scholae sed vitae discimus*, yang berarti "Belajar di sekolah tidak semata-mata untuk memperoleh pengetahuan, melainkan untuk memahami makna hidup dan kehidupan" (Hartoko, 1989). Adagium ini mengikhtikarkan bahwa pendidikan merupakan upaya sadar dan mendasar untuk membentuk nilai-nilai kehidupan melalui tahapan transformasi diri. Pada tataran pemaknaan tujuan pendidikan di atas, manusia yang berpendidikan akan memiliki nilai hidup jika memiliki karakter kehidupan, sehingga karakter diri yang bernilai tidak hanya melalui pengaruh proses pendidikan, tetapi hendaknya dimaknai melalui penciptaan dalam proses pedagogi yang berkelanjutan (Semadi, 2019). Tuntutan ini sangat mendasar dan sejalan dengan hakikat pendidikan karena target capaian pendidikan pada dasarnya tidak hanya membentuk kecerdasan, tetapi mengakar pada transformasi diri yang mengarah pada kepemilikan karakter diri yang kokoh dan kuat. Pemikiran ini dipertegas dalam pernyataan yang dikemukakan oleh tokoh reformis sosio-religius Martin Luther King "The usefulness of education is to teach someone to have a broad mindset and have a critical way of thinking. Thus, the domain of intelligence is incomplete, but needs to be supplemented by self-character ownership, and hope is the goal of real education" (Agboola & Tsai, 2015). Dewantara (1977) menegaskan hal yang sama, "Jika tujuan pendidikan yang dilakukan di sekolah menekankan pembentukan kecerdasan dan pembentukan pengetahuan, masih akan ada sesuatu yang kurang berarti bagi kehidupan karena tujuan tersebut memiliki pengaruh yang kecil terhadap pembentukan karakter dan peningkatan kesadaran sosial". Karena itu, selama sekolah masih fokus secara eksklusif pada pengembangan pengetahuan, maka "pribadi" tersebut akan tetap *zakelijik* (kehilangan jiwa), dan berdampak pada rendahnya pembentukan karakter dan pengembangan perasaan sosial.

Merujuk pada penegasan pentingnya pemberian pendidikan karakter, desain pendidikan perlu untuk berbalik arah. Paradigma baru pendidikan nasional pun bermetamorfosis pada program pendidikan karakter yang memberi penekanan pada pemaknaan dan pengimplementasian konkrit yang berkiblat pada spirit jiwa nasionalisme yang teridentifikasi dalam makna historisitas nilai dan norma Pancasila kepada peserta didik, agar menyadari posisi, peran, dan tanggungjawab sebagai warga negara. Karakter

nasionalis meliputi penghargaan dan pelestarian pada nilai-nilai kearifan budaya lokal, memiliki jiwa berkorban, pribadi yang bermutu dan berkecakapan tinggi, cinta tanah tumpah darah, merawat lingkungan, mentaati hukum yang berlaku, tertib, serta menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama (Effendi, 2020; Rahman & Suharno, 2020). Pendidikan nasional harus mampu mempersiapkan dan menguatkan jati diri peserta didik agar mampu memaknai dan menemukan solusi alternatif kehidupan yang lebih baik ketika berhadapan dengan berbagai tantangan kehidupan baik secara individu maupun bermasyarakat dalam bingkai sistem pemikiran yang berdaulat yang dilandasi jiwa Pancasila. Selain itu paradigma penerapan nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan bertujuan untuk membentuk sikap mental peserta didik agar mampu mengimplementasi nilai-nilai religius, humanistik, patriotisme, serta penguatan karakter masyarakat madani yang memahami dalam mendalami semangat demokratis, berkeadilan-multikultural, dan berwibawa-bermartabat sesuai penekanan semangat Pancasila, serta mampu berdialog dalam kancah dinamika kehidupan internal dan eksternal sebagai warga bangsa baik di level lokal, nasional, dan internasional.

### **Pancasila sebagai Sistem Filsafat**

Pengertian etimologis kata filsafat dipertegas dalam buku *Philosophy of Education* (Pring, 2005). Merujuk pada asalnya, kata filsafat berasal dari kata Yunani yaitu *philosophia* yang merupakan gabungan dua kata "*phileo/philos/philia*" yang berarti cinta dan "*sophi*" yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian kata filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Mencintai sesuatu dalam konteks kepemilikan berarti sama halnya menginginkan/memilikinya. Pada tataran ini, kebijaksanaan tidak hanya pada tataran penguasaan pengetahuan karena seseorang mungkin memiliki pengetahuan, tetapi tidak selamanya bijaksana. Karena itu kebijaksanaan berarti, "kemampuan untuk memaknai dan mengambil keputusan yang masuk akal dan memberikan penilaian yang baik karena pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang". Kebijaksanaan merupakan pengimplementasian pengetahuan yang terindikasi dalam keputusan yang benar, adil, demokratis dan bermakna populis. Untuk memiliki kebijaksanaan, individu berupaya sengaja untuk memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, kajian filsafat merupakan pencarian jati diri manusia untuk menelusuri makna dan kebijaksanaan hidup yang dapat digunakan dan dimaknai sebagai sebuah pengembangan konsep praktis yang bermanfaat bagi perkembangan peradaban manusia baik sekarang maupun di masa depan. Pada tataran kajian ini, filsafat mendukung pemahaman manusia untuk memberi hikmat terhadap apa yang dikaji dan ditelusuri dalam kehidupan alam semesta dan implikasinya dengan kehidupan diri pribadi dan orang lain dalam kehidupan bersama.

Membedah Pancasila dalam sebuah kajian filsafat berarti menelusuri konsep-konsep epistemologi historisitas Pancasila yang bukan saja pencarian historisitas hakikat bangsa Indonesia, tetapi juga pemaknaan historisitas manusia pada pemaknaan hidupnya. Dengan kata lain, pemaknaan historisitas Pancasila sebagai telaahan filsafat mengandung aspek ontologi, aksiologi, dan epistemologi yang menjadi pembedahan esensial dalam memaknai isi pembentukan ideologi Pancasila. Artinya, kebenaran Pancasila dalam refleksi filosofis berfungsi sebagai pedoman kehidupan yang didasarkan pada perjalanan historisitas perjuangan bangsa Indonesia (Junaedi, 2018). Pada tataran praksis, refleksi filosofis Pancasila mengafirmasi bahwa Pancasila yang memuat lima sila dalam satu kesatuan yang integral, berakar pada nilai-nilai ontologi budaya luhur yang mendasari eksistensi masyarakat Indonesia yang multikultural, multireligius, serta multi-etnis. Dengan demikian, subjek fundamental hakikat filsafat dibedah untuk mendalami dan mempelajari hakikat sesuatu yang ada dalam eksistensi material konkrit kehidupan semua

mahluk (manusia, binatang, alam) dan abstrak-metafisis (nilai-nilai kehidupan, pergumulan ide-ide kehidupan yang dihasilkan melalui kajian pemikiran, moral perilaku kehidupan manusia dan pandangan hidup yang mendukung eksistensi manusia).

Pada tataran pencarian makna kebangsaan, Pancasila sebagai sistem filsafat memberi makna pada jati diri bangsa Indonesia. Dikatakan demikian karena eksistensi Pancasila pada esensi merupakan hasil refleksi kritis dalam permenungan jiwa *the founding fathers* Indonesia, yang tereksplisit secara sah dalam kajian sistem falsafah kehidupan bernegara. Hasil perenungan mendalam dimaklumkan secara resmi bersamaan dengan klausul Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 sebagai titik puncak pemaknaan Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Pada tataran implementatif, filsafat Pancasila merupakan arah kehidupan warga negara dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Dengan demikian, filsafat Pancasila merupakan permenungan reflektif kritis dan epistemologi tentang hakikat kekuatan Pancasila sebagai ideologi negara yang inspiratif serta realitas kearifan budaya bangsa.

Secara umum pemaknaan Pancasila dalam kajian filosofis merupakan hasil berpikir kritis dan mendalam tentang pergumulan historisitas bangsa Indonesia melalui penelusuran yang dapat dipercaya dan dimaknai sebagai realitas empiris untuk menghayati norma-norma dan nilai-nilai yang benar, baik dalam aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologis, sejalan dengan arah kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia yang multidimensi kewarganegaraan. Pancasila menjadi rujukan filosofis yang asli Indonesia karena bersumber dari kearifan budaya dan tradisi yang mengakar dalam lingkungan kehidupan Indonesia, dan telah mengalami proses akulturasi dan inkulturasi dengan budaya India (Hindu-Buddha), Barat (Kristen), dan Arab (Islam). Kerangka pikir yang ada mengamini pemikiran [Notonagoro \(1974\)](#) yang menjelaskan bahwa kedudukan Pancasila dalam eksistensi historisitas Negara Republik Indonesia sebagai dasar dasar filsafat bernegara. Hakikat filosofi Pancasila diafirmasi sebagai landasan negara yang diformulasi dalam aspek holistik kelima sila dengan kandungan kata-kata yang terintegrasi pada hakikat kehidupan yang bersumber pada ketuhanan, pemaknaan arti nilai kemanusiaan, perjuangan ideal dalam semangat persatuan (kesatuan dalam dinamika kehidupan yang beragam), kerakyatan dalam nilai demokrasi, dan keadilan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban. Kelima sila Pancasila ini mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai kajian praksis penelusuran filsafat, Pancasila mengakar pada kekayaan kehidupan manusia Indonesia dalam keseluruhan suasana kehidupan yang membatin yang menghasilkan pijakan arah pikir dan perilaku yang inspiratif dalam menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan.

### **Karakteristik Pancasila dalam Historisitas Sistem Filsafat**

Pancasila yang termaktub dalam lima sila secara esensial merupakan kajian historisitas sistem filsafat. Sistem pada esensi menerangkan hakikat kesatuan dari bagian-bagian dalam keterhubungan, kerja bersama untuk mewujudkan tujuan tertentu dan secara holistik membentuk kesatuan yang utuh dalam keberagaman. Mendalami karakteristik Pancasila dalam perenungan rasional sistem filsafat dapat ditelusuri dan dimaknai melalui pola pikir deduktif dan induktif. Pola pikir deduktif merupakan bentuk pencarian makna hakikat Pancasila yang dianalisis serta disusun secara sistematis dalam keutuhan pandangan yang komprehensif. Sedangkan pola pikir induktif mengakar pada cara mengamati gejala-gejala kehidupan pada ranah sosia-budaya masyarakat, memberi refleksi kritis, dan menarik arti pemaknaan hakiki dari gejala-gejala kehidupan masyarakat. Sila-sila dalam Pancasila melalui telaahan kritis sistem filsafat merupakan satu

kesatuan organis-masyarakat. Artinya, sila-sila dalam Pancasila saling berkorelasi makna, saling berkontribusi bahkan saling mengkualifikasi satu terhadap yang lain.

Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung karakteristik yang berbeda dan unik dari aliran filsafat lainnya, karena keberadaan sila-sila yang terkandung di dalamnya menyatu dalam sistem berpikir, berperilaku yang utuh dan integratif (sebagai wujud totalitas-makna kebersatuan) dalam keteraturan, keterkaitan, kerjasama, dan tujuan bersama (Suryatni, 2016). Keteraturan yang membentuk sistem hierarki, memaknai eksistensi Pancasila dalam lima sila. Menyatupadukan tahapan urutan-urutan yang bertingkat, di mana masing-masing sila mengambil posisi yang sama bernilai dan tetap dalam pemaknaan. Keterkaitan yaitu adanya keterhubungan yang kuat sila satu terhadap sila yang lain. Kerjasama, dimana sila yang satu dengan sila yang lain saling menyatu dan tidak bertentangan, dan jika salah satu sila kehilangan makna dan kedudukannya, maka sila-sila lainnya pun kehilangan makna, kedudukan dan fungsinya. Tujuan yang ingin dicapai dalam memaknai sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dalam kajian filsafat adalah mewujudkan semangat nasionalisme yang termaktub pula dalam Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya Pancasila dengan lima sila yang bulat dan utuh serta integral perlu berpijak di atas dimensi filosofis yang kokoh yang mencakup dimensi ontologis, epistemologis dan aksiologis Pancasila. Ketiga dimensi filosofis tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan.

### ***Dimensi Ontologi Pancasila***

Dimensi ontologi mengafirmasi eksistensi cabang filsafat yang membedah kajian kritis yang mempertegas hakikat apa yang “ada” dan penyebab eksistensi “ada” untuk atau alasan berada. Dimensi ontologi tentu berbeda dalam konteks kepentingan untuk memaknai, mendefinisikan, dan juga dalam konteks pendekatan terhadap eksistensi “ada”. Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan arti ontologi sebagai berikut: (1) *A branch of metaphysics concerned with the nature of and how being relates to one another*; dan (2) *A particular theory concerning the nature of being or the kinds of things that exist*. Pengertian pertama menunjukkan bahwa ontologi merupakan *branch of the metaphysical dimension*. Kajian dimensi metafisika berkembang dan melahirkan cabang ilmu lain dalam dimensi ontologi yang membedah hakikat dan dialogis eksistensi yang “ada” (*being*). Selanjutnya, pemaknaan kedua, mendeskripsikan bahwa ontologi merupakan *a special theory dealing with the nature of existence/being*. Dengan demikian dimensi ontologi Pancasila membedah eksistensi Pancasila dalam lingkup gugatan pertanyaan *what causes it and how Pancasila can be used to “ada”*. Kajian pemaknaan Pancasila sebagai realitas ontologi diperdalam melalui pembedahan *Aristotle's theory of causality* dan *the concept of Tri Prakara*.

Merujuk pada *Aristotle's theory of causality*, pemaknaan “ada” nya Pancasila menurut Notonagoro (1974) memiliki derivasi sebagai berikut. Pertama, *the origin of the material (the materialist cause of Pancasila)*, berawal dari akar perjalanan kehidupan sejarah bangsa Indonesia dalam penelusuran tata adat-istiadat yang membentuk aspek kebudayaan, penanaman dan pemaknaan nilai-nilai religius yang menjadi pusat sentral (sentrifugal) historisitas kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, *the origin of the form (causa forma/is Pancasila)*, terdeskripsi dalam isi UUD 1945 yang terinspirasi dari permenungan reflektif Soekarno, Yamin, Soepomo, Panitia 9, serta anggota BPUPK dalam format pengajuan formulasi Pancasila. Ketiga, *the origin of the work (causa efficien Pancasila)*, yang mengiktiarkan cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara dan kemudian dimaklumkan sebagai dasar negara dalam sidang pengesahan Pancasila oleh PPKI, 18 Agustus 1945. Keempat, *destination origin (causa finalis Pancasila)* yang mempertegas rumusan akhir

Pancasila yang dikemukakan melalui sidang-sidang BPUPK dan PPKI yang mendasarkan pengakuan hakiki dimana Pancasila sebagai dasar negara.

Selanjutnya, konsep ontologis Pancasila terdeskripsi melalui pengafirmasian tiga asas sebagai penguat dimensi ontologis yang dikenal dengan istilah *Tri Prakara*. *Pertama*, asas kehidupan melalui pewarisan budaya. Maksudnya, eksistensi Pancasila telah ada dalam kebudayaan hidup berdasarkan nilai-nilai dan norma yang telah ada. *Kedua*, asas religi yang memaknai pengakuan nilai Pancasila yang bertujuan untuk mengakui dan menyatukan ajaran agama-agama dalam semangat toleransi beragama. *Ketiga*, asas kewarganegaraan, memaklumkan eksistensi Pancasila melalui perumusan yang tertuang dalam sidang BPUPK dan PPKI. Pemaknaan konsep ontologis Pancasila merupakan bangunan konsep fundamental berbangsa dan bernegara yang dapat diimplementasikan pada tataran tindakan manusiawi oleh setiap warga negara (Kaelan, 2013). Pancasila sebagai suatu realitas merujuk pada status ontologis sesuatu yang mengafirmasi keberadaannya. Dasar eksistensi ontologis Pancasila pada esensinya adalah manusia dalam kebenaran yang mutlak. Karena itu, keberadaan rumusan sila-sila bukanlah asas yang otonom dalam kemandirian untuk berdiri sendiri, tetapi memiliki penyatuan dasar yang berdimensi ontologis.

Dalam istilah fisik, Pancasila merupakan realitas *in se* yang mengandung nilai totalitas dalam sistem untuk diketahui dan tidak diketahui. Pancasila sebagai realitas yang diketahui bersifat empiris dalam fakta yang terungkap pada asas fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai realitas yang tidak diketahui merupakan realitas universal yang mengandung kesamaan unsur, yang bersifat tetap dan tidak pernah berubah. Realitas yang tidak diketahui dalam hakikat Pancasila telah menyatu dalam spirit dan jiwa bangsa Indonesia. Penyatuan spirit dan jiwa bangsa mengamini bahwa Pancasila telah menyatukan dimensi nilai-nilai yang berbeda dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena secara eksistensial kelahiran Pancasila seiring historisitas perjalanan perjuangan bangsa Indonesia. Dengan ini mengafirmasi eksistensi perjalanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terhistori bukan berawal dari ambisi merebut kemerdekaan demi kepentingan dan keuntungan individu dari bangsa penjajah. Historisitas perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia berawal dari ikhtiar gagasan pemikiran kebangsaan untuk membangkitkan kesadaran kehidupan yang merdeka dalam menghayati kehidupan religius (beragama dalam keberagaman), kemanusiaan yang memiliki otonomi pribadi dan sosial, kebersatuan dalam keberagaman dengan membangun pemufakatan dan kerjasama, serta menjunjung asas keadilan sebagai pengejawantahan makna ontologis Pancasila yang menyatu dengan humanitas warga negara. Selain itu, implementasi ontologis Pancasila dalam penanaman nilai-nilai karakter nasionalisme di sekolah dimaknai sebagai upaya sadar untuk mengarahkan dan membimbing peserta didik mengetahui dan memaknai hakikat dasar kandungan nilai pada sila-sila Pancasila yang mendasar pada kata: (1) ketuhanan sebagai eksistensi hakikat keberadaan kehidupan rohaniah, (2) kemanusiaan yang autentik dalam penghargaan martabat sebagai ciptaan Tuhan, (3) persatuan yang melingkupi nilai penyatuan dalam semangat menghargai perbedaan, (4) kerakyatan yang menjunjung pemufakatan dalam semangat demokrasi, dan (5) keadilan yang mengedepankan keseimbangan tuntutan hak dan kewajiban.

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa secara hierarkis menjiwai dan mendasari keempat sila-sila lain dalam Pancasila (Notonagoro, 1974). Sila pertama, dalam makna ontologis menelaah tentang eksistensi Tuhan bukan sebagai objek, tetapi eksistensi alam semesta. Tuhan dipandang semata-mata sebagai *causa prima*. Arah pendidikan karakter di sekolah adalah membedah eksistensi Tuhan dalam pemaknaan sila pertama Pancasila dimulai dari

pemikiran bahwa setiap warga negara melaksanakan dan menghayati kehidupan religi. Pengalaman religi dalam cara pandang fenomenologis mengarahkan bahwa kehadiran Tuhan tampak sangat dekat. Religi merupakan inti kepercayaan yang dimaknai dalam spirit agama-agama. Eksistensi Tuhan yang menjadi inti pencarian dan pemaknaan hidup manusia di dunia dan akhirat selalu direfleksikan dalam perenungan sepanjang sejarah hidup manusia. Manusia sesungguhnya sangat dekat dalam jejaring relasi rohani, tetapi juga menjadi misteri tidak terjangkau dalam lingkaran pemikiran rasional teologis. Bahwa setiap warga negara yang beragama memiliki tujuan akhir kehidupan dalam komitmen rohani untuk terus berbuat baik dan meyakini bahwa perbuatan baik akan mendapat rahmat, pahala, berkah dari Allah sebagai pengatur tata tertib alam semesta (Notonagoro, 1974).

Sila kedua, negara sebagai lembaga kemanusiaan memosisikan peran melindungi dan menghargai martabat manusia (Notonagoro, 1974). Arah kebijakan pembentukan karakter melalui pendidikan di sekolah bertujuan membangun kesadaran peserta didik sebagai warga negara agar perlu mengakui, menjunjung tinggi dan menghormati sesama manusia sesuai harkat dan martabatnya. Realitas implementatifnya adalah memosisikan sesama manusia dalam persamaan derajat, menyeimbangkan pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengakui dan mengormati perbedaan latar belakang suku, agama, golongan, gender, warna kulit, serta kedudukan sosial masyarakat. Pengembangan sikap kepekaan humanis dalam semangat kesejajaran perlakuan terhadap sesama manusia yang dibuktikan melalui pengejawantahan sikap tolong menolong yang dilandasi rasa cinta, rasa kekeluargaan, rasa memiliki yang lain sebagai sesama citra Allah, tidak memperlakukan sesama manusia secara tidak adil, mengedepankan aspek kemanusiaan dalam berbagai respon keberpihakan pada kepentingan kemanusiaan, serta berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran demi kepentingan hidup bersama. Khasanah pemaknaan sila kedua Pancasila ini mempertegas eksistensi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang lahir berlandaskan semangat perjuangan humanisme baru (humanitas yang melampaui etnosentrisme) karena menyadari panggilan hidup sebagai bagian dari keberadaan seluruh manusia dengan menunjukkan semangat mencintai dan menghormati serta siap bekerja sama dengan bangsa lain dalam konteks lintas agama dan kepentingan.

Driyarkara (1977) mengafirmasi pula melalui pernyataan bahwa isi Pancasila adalah humanisme yang sosialis. Landasan humanisme yang sosialis dalam sila kedua Pancasila adalah membina dan mendidik peserta didik sebagai warga negara dalam semangat kerja sama untuk merealisasikan kebaikan bersama. Kebaikan bersama dalam konteks nilai-nilai humanisme mengejawantahkan eksistensi pribadi manusia sebagai pusat pendidikan yang berwawasan kebangsaan, nasionalisme, serta humanisme dalam kerangka hubungan yang membentuk komunitas warga negara yang hidup saling bergantung dan terikat pada kebahagiaan bersama (*eudamonia-Aristoteles*) yaitu penghargaan terhadap martabat manusia (Semadi, 2019). Intipati pendidikan yang humanistik pada hakikatnya adalah penerapan konsep ajaran dalam praksis hidup yang mengunggulkan tindakan cinta kasih. Kasih adalah prinsip religius yang merefleksikan keberadaan karya Allah yang nyata melalui tindakan sesama manusia karena menjadi visi bersama dalam membangun humanisme baru dalam komunitas bersama sebagai warga negara. Kehadiran Allah menjadi nyata dalam hidup manusia ketika ikut terlibat dalam tindakan berbela rasa (*compassion*), belas kasih (*mercy*) dan perjuangan untuk menciptakan keadilan bersama (*justice*) dalam dunia yang semakin menantang dan kompetitif, terutama kondisi dunia pemiskinan dan terpinggirkan akibat persaingan yang menggeser kehidupan sesama yang lain.

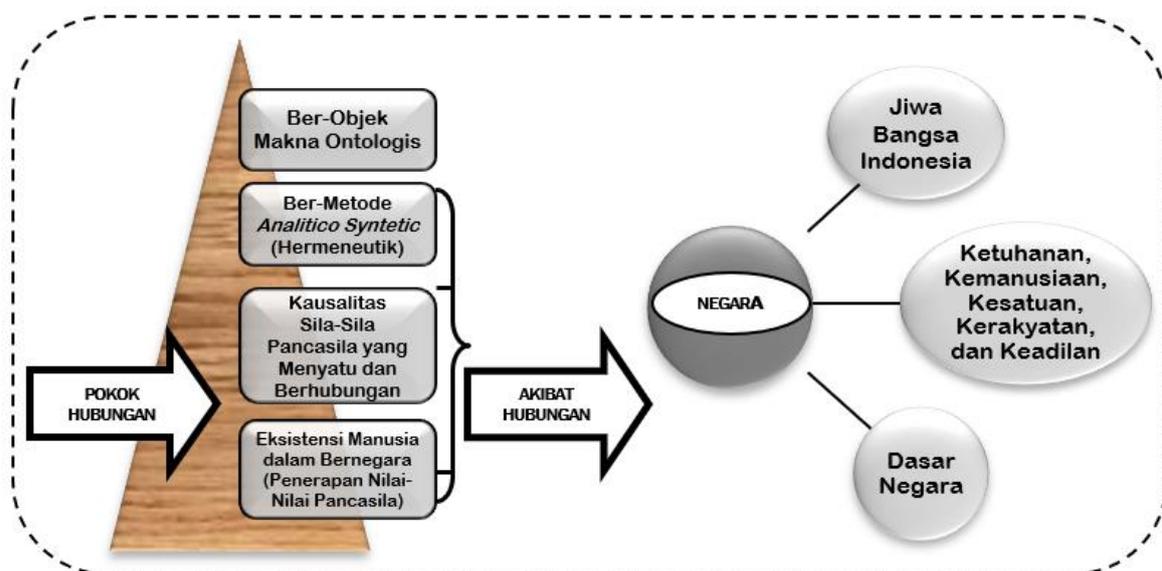
Sila ketiga, terkandung aspek ontologis yang mempertegas “adanya negara” sebagai pendamai kodrat manusia, sebagai makhluk paradoksal yang monodualis yaitu makhluk yang mementingkan otonomitas diri dan makhluk dialogis dalam kebersamaan dengan orang lain. Hakikat ontologis dalam kehidupan me-negara terserap melalui pengakuan pemersatuan hidup individu-individu untuk membentuk kebersamaan. Dimensi kebersamaan serentak menggugat kodrat manusia sebagai makhluk unik dan berbeda (suku, ras, dan golongan) untuk dipersatukan demi kesejahteraan bersama sebagai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Kebersamaan warga negara sebagai satu bangsa mengafirmasi konsep relasional subjek-subjek dalam pemikiran Marcel (1970) “Ada (*sein*) bukan berarti ada sendiri, tetapi ada bersama (*Mit-sein*). Manusia tak hanya Aku, tetapi juga Kita. Dalam aku (*Ich*) ada engkau (*Du*). Tanpa bertemu Engkau, Aku tidak akan menjadi Aku. Aku hanya menjadi Aku ketika bertemu Engkau”. Konsekuensi ontologis dalam pendidikan karakter nasionalis bagi peserta didik di mana peserta didik mengakui bahwa negara bertanggung jawab memenuhi kesejahteraan bersama dan mengikat kebersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan tuntutan kepada setiap warga negara agar memaknai perbedaan bukan sebagai sumber konflik dan permusuhan, tetapi memaknainya sebagai suatu sintesa yang saling menguntungkan demi kebaikan sebagai tujuan “adanya” bersama.

Semangat persatuan dilandasi oleh spirit religius yang terungkap dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang memosisikan manusia sebagai makhluk yang diciptakan secitra Allah dan sikap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang diejahwantakan melalui perlakuan yang adil dan memiliki keadaban. Pengafirmasian semangat persatuan ini mengandung makna bahwa kebersatuan sebagai warga negara dalam keberagaman Indonesia adalah persatuan dalam aspek religiusitas dan humanistik yang memosisikan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang ber-Tuhan. Dengan demikian, dimensi-dimensi persatuan ini harus terdeteksi dalam kebijakan pengambilan keputusan oleh penyelenggara negara seperti: (1) memosisikan kiat dan niat persatuan, kebersatuan, serta keselarasan kepentingan serta keselamatan hidup berbangsa dan bernegara sebagai kepentingan populus di atas tuntutan kepentingan yang bersifat pribadi dan golongan yang terselubung; (2) memberikan komitmen kesanggupan dan semangat rela berkorban dalam wajah patriotisme untuk menjaga keutuhan kepentingan negara dan bangsa jika dituntut dan diperlukan pertanggungjawabannya; (3) mengedepankan komitmen yang tulus yang ditunjukkan melalui keinginan sungguh untuk mencintai tanah tumpah darah yang dibangun dalam semangat merawat kebangsaan Indonesia; (4) berkomitmen untuk menunjukkan rasa kebanggaan terhadap semangat kebangsaan dan menyadari asal kehidupan yang bertanah air Indonesia; (5) memelihara dan menjaga kedamaian dunia dalam tata kehidupan yang tertib, damai, harmonis dan dialogis yang diinspirasi oleh semangat kebebasan dan kemerdekaan, perdamaian yang berkelanjutan dan keadilan dalam tata kehidupan yang mendunia; (6) mengembangkan semangat persatuan dalam keberagaman Indonesia dalam mosaik Bhinneka Tunggal Ika yang kokoh, tangguh dan berdaulat; dan (7) memajukan dan mengedepankan dialog persuasif antarsesama warga negara dan antara warga negara yang mendunia demi tegaknya kewibawaan Indonesia yang bersatu, berdamai, dan berkolaborasi dengan negara lain sebagai konsekuensi pengejahwantahan kebijakan politik *non-block* dan bebas aktif.

Sila keempat, mengandung makna ontologis dalam pemaknaan pendidikan karakter di sekolah yaitu eksistensi bernegara merupakan pengejahwantahan pengakuan dan penghargaan terhadap kodrat manusia sebagai makhluk ontonom dan makhluk bersosial-dialogis dalam kebersamaan. Pada tataran praksis keberadaan setiap warga negara merupakan individu dan sekelompok manusia yang membangun konsep bersama untuk

menghasilkan kebijakan bersama yang dilandasi pemufakatan yang demokratis demi mencapai kebersatuan, kedamaian, kerukunan, yang tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam kesatuan wilayah negara yang berkebinekaan. Karena pada hakikatnya negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat, maka pemahaman ini memperkuat eksistensi rakyat dalam mendukung kehidupan bersama yang menyatu dengan kepemilikan dan kepercayaan masyarakat kepada negara sebagai sumber kekuasaan negara. Pada tataran ini kandungan sila kerakyatan memposisikan aspek pemufakatan bersama berbasis nilai demokrasi secara mutlak diejawantakan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, perlu pengakuan terhadap hak dan kewajiban warga negara dan warga masyarakat oleh negara secara sama dan sejajar serta adil di hadapan hukum sehingga tercipta keseimbangan antara tuntutan hak dan kewajiban. Implementasi praksis dari penegasan ini adalah tidak ada lagi pemaksanaan kehendak pribadi atau kelompok, mengedepankan aspek musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan yang populis dengan berlandaskan semangat kekeluargaan, toleran, dan asas berkeadilan dan kesejajaran hidup berbangsa dan bernegara.

Sila kelima, perlakuan yang adil yang diperuntukkan bagi keseluruhan masyarakat Indonesia merupakan pemakluman hakikat penegasan sikap perikemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengimplementasian sila berkeadilan sosial, mengindikasikan kepemilikan dan kegunaan barang-barang dunia (materiel) diperuntukkan dan difungsikan sebagai kepenuhan hidup manusia secara bersama-sama dalam arah tanggung jawab negara. Pada tataran makna, sila ini merupakan suatu kesatuan dalam eksistensi manusia yang membentuk hubungan kausalitas. Negara sebagai pendukung pemenuhan hubungan kepentingan, sedangkan warga negara sebagai subjek dari nilai-nilai (berketuhanan, berperikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan) sebagai pokok pangkal hubungan. Ikhtiar filosofis kesilaan dalam Pancasila sebagai *causa final* untuk mempertegas kemanusiaan warga negara sebagai makhluk yang beriman, berkarakter humanistik, kebersatuan dalam keberagaman, kerakyatan untuk menyadari tanggung jawab bersama, keadilan dan kesetaraan hak dan kewajiban merupakan aspek penyebab, serta negara memposisikan diri sebagai akibat keterhubungan kesilaan yang satu dan lainnya. Hubungan kausalitas makna ontologis Pancasila dapat dicermati melalui gambar 1.



Gambar 1. Hubungan Kausalitas Aspek Ontologis Pancasila

### ***Dimensi Epistemologis Pancasila***

Kata epistemologi bersumber dari kata Yunani *episteme* yang berarti pengetahuan; pemahaman dan *logos* yang berarti kata; pikiran; pembicaraan; atau ilmu. Secara umum epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji sumber, watak/sifat dan ruang lingkup kebenaran pengetahuan dan biasa disebut sebagai “teori pengetahuan”. Dengan kata lain epistemologi adalah studi tentang sifat, sumber, dan validitas pengetahuan. Studi ini berusaha untuk menjawab pertanyaan dasar seperti apa yang benar, bagaimana mengetahui yang benar. Jadi, epistemologi mencakup dua bidang, yaitu: “isi pikiran” dan “berpikir” itu sendiri. Epistemologi Pancasila berhubungan dengan isu-isu yang berkaitan dengan ketergantungan pengetahuan dan validitas sumber melalui mana kita mendapatkan informasi yang berkaitan Pancasila.

Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila telah menjadi sumber pengetahuan yang mendasari lahirnya bangsa Indonesia. Pada tataran ini, Pancasila memiliki domain rasionalitas epistemologi sosio-historis, sosio-budaya, nasionalisme, humanisme dan ideologi. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Karena itu dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan *causa materialis* Pancasila. Makna epistemologi Pancasila yang dapat dijelaskan dalam penjabaran penguatan karakter peserta didik di sekolah adalah sebagai berikut.

Sila pertama memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi atau wahyu yang digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Eksistensi kebenaran ajaran agama-agama yang diakui di Indonesia, memandang positif agama-agama lain, seraya mencari segi-segi yang dapat menghantar ke dialog dan rekonsiliasi. Indonesia merupakan masyarakat yang pluralis. Keberanekaragaman agama menjadi hal yang sangat biasa dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Penekanan aspek epistemologi Pancasila dari sila pertama ini adalah toleransi dan saling pengharagaan yang tinggi antar kehidupan umat beragama. Dengan demikian Pancasila berisi pengetahuan yang menerangkan bahwa pluralisme bukan lagi sebuah persoalan, namun menjadi sarana di mana setiap warga negara saling memahami dan menghargai, sehingga terciptalah kedamaian dan kerukunan yang sejati antar umat beragama.

Sila kedua bersumber dari pengalaman dan kesadaran masyarakat Indonesia yang ditindas oleh penjajahan. Makna epistemologis penjabaran penguatan karakter nasionalisme peserta didik di sekolah adalah memaknai kemerdekaan sebagai pembebasan dan pengakuan martabat manusia Indonesia yang pernah hilang. Gagasan tentang martabat manusia bersumber pada keyakinan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan kesamaan dengan Allah. Dengan menjadi citra Allah, manusia bukan sekedar ciptaan seperti ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Ia menjadi pusat dan puncak ciptaan Allah. Dengan demikian, penekanan aspek epistemologi Pancasila terletak pada kemerdekaan adalah hak setiap warga negara karena itu perlu dirasakan oleh seluruh warga bangsa tanpa diskriminasi. Sila ketiga, digali dari pengalaman keterpecahbelahan akibat politik *divide et impera* yang menimbulkan konflik horizontal masyarakat Indonesia. Penjabaran penguatan karakter nasionalisme peserta didik di sekolah adalah membangun kesadaran peserta didik untuk menjaga keutuhan bersama dalam semangat kebersatuan dengan

menyuarakan kerangka perkembangan terpadu manusia dan solidaritas dengan semua umat manusia. Setiap warga negara secara khusus juga dipanggil dalam tugas menjadi bagian masyarakat untuk memperhatikan dan merawat (*caring*) relasi sosial sehingga perdamaian, kerukunan dan keamanan dalam masyarakat terjaga. Makna epistemologis Pancasila di mana masyarakat yang penuh damai dan saling memperhatikan merupakan kondisi dan lingkungan yang diperlukan untuk membangun solidaritas, keadilan dan perdamaian. Menjaga persatuan dalam perbedaan menjadi tuntutan mutlak setiap warga negara.

Sila keempat, digali dari budaya bangsa Indonesia yang secara turun-temurun melakukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Penekanan sila keempat dalam penanaman nilai-nilai karakter nasionalis tentu mempertegas pernyataan tidak anti demokrasi, terutama jika para wakil rakyat itu sungguh-sungguh menyuarakan suara rakyat, terutama rakyat kecil. Makna epistemologisnya membangun semangat demokrasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Sila kelima, digali dari semangat gotong royong. Semuanya terhubung dan perlindungan autentik untuk hidup manusia dan hubungannya dengan alam tidak dapat dilepaskan dari persaudaraan, keadilan dan kesetiaan kepada pihak lain. Berkaitan dengan pencapaian kesejahteraan secara ekonomi, menekankan semangat untuk melayani kebutuhan sesama demi terwujudnya kesejahteraan sosial sebagai wujud pembebasan terhadap kemiskinan. Semuanya dapat terpenuhi jika terciptanya asas keadilan yang terekspresi melalui perasaan kasih kepada sesama dalam kegiatan bersama. Dengan kata lain, makna epistemologisnya yaitu menjunjung tinggi nilai keadilan untuk kesejahteraan bersama.

### ***Dimensi Aksiologis Pancasila***

Pancasila adalah sumber nilai bagi bangsa Indonesia, baik menyangkut aspek intrinsik maupun aspek instrumental. Pancasila dalam penekanan nilai intrinsik menerangkan bahwa ada perpaduan antara nilai original kepemilikan bangsa Indonesia dengan nilai pengendapan kehidupan yang bersumber dari proses akulturasi dengan budaya luar, yang terserap dan terinternalisasi pada perjalanan historisitas abad IV Masehi, era imperialisme, dan hasil jelajah pemikiran kenegarawanan para cendekiawan. Kekhususan penekanan nilai yang terekam dalam landasan Pancasila merupakan nilai intrinsik yang menyatu dalam pembentukan nilai-nilai religius, humanistik, persatuan dalam keberagaman, kerakyatan dalam semangat demokrasi melalui musyawarah dan mufakat, dan keadilan bersama sebagai kesatuan yang hakiki dan bersifat universal. Nilai-nilai universal dipahami tidak hanya menjadi kepemilikan warga bangsa Indonesia saja, melainkan juga menjadi kepemilikan warga global. Pancasila yang terekspresi dalam nilai instrumental menekankan aspek imperatif yang memberi pedoman bahwa perwujudan cita-cita berbangsa dan bernegara, seyogyanya disesuaikan dengan hakikat nilai-nilai yang menekankan aspek religiusitas warga negara yang beriman, berkemanusiaan, berkebersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial-masyarakat. Dengan demikian penekanan aspek instrumental mengikhtiarkan bahwa Pancasila tidak hanya mengidentikasi identitas kemanusiaan Indonesia, melainkan juga merupakan perwujudan fungsi kehidupan bersama yang sejalan dengan tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya landasan aksiologis Pancasila pada sila pertama mengindikasikan eksistensi masyarakat Indonesia sebagai makhluk paradoksal/monoteis dalam keberadaan sebagai makhluk spiritual yang membangun kekudusan hidup yang sakral. Sila kemanusiaan yang humanistik mengedepankan nilai pembebasan dan pemerdekaan martabat, harga diri, yang otonom. Sila persatuan pada kandungan aspek solidaritas yang menyatukan semangat kerekanan dan kesetiakawanan setiap warga bangsa. Sila keempat dalam

penyatuan prinsip kehidupan melalui semangat demokratis dan jiwa besar dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila keadilan memberi nuansa pada penekanan nilai kepedulian dan kesetaraan dalam semangat gotong royong.

### **Penguatan Karakter Melalui Pemaknaan Sila-Sila Pancasila**

Pemaknaan Pancasila dalam cakupan kelima sila merupakan wujud keutuhan satu tujuan yang dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, kesatuan makna dalam sila Pancasila terbentuk dan tersusun membentuk deskripsi hierarkis-piramidal. Pada gambaran hierarkis, eksistensi sila-sila Pancasila membentuk tingkatan yang berjenjang. Gambaran ini untuk mempertegas makna bahwa sila pertama mengokohkan eksistensi penerapan sila kedua, sila kedua mengokohkan keberadaan manusia yang saling bersatu dalam pemaknaan sila ketiga, sila ketiga mengokohkan kebersatuan manusia dalam perbedaan dan keberagaman melalui musyawarah dalam kehidupan demokrasi untuk mufakat yang menjadi intipati makna sila keempat, dan sila keempat mengokohkan kebersamaan dalam mufakat untuk memperjuangkan semangat keadilan sosial sebagai wujud pemaknaan sila kelima. Secara matematis, dimensi piramidal mendeskripsikan keterhubungan dialogis makna hierarkis sila-sila Pancasila yang mempertegas pengurutan dan kedudukan setiap sila yang mengikhtiarkan kekhususan dari setiap sila yang diurutkan di depannya.

Implementasi maknanya dapat diterangkan bahwa sila pertama menjadi landasan sentral membangun semangat kehidupan kemanusiaan yang humanistik, persatuan yang utuh dalam menghargai keberagaman Indonesia, jalinan kehidupan semangat kerakyatan yang demokratis untuk menciptakan keadilan yang setara dalam perlakuan sosial-masyarakat. Karena itu, aspek Ketuhanan dalam keesaan hakikat diimplementasikan dalam perilaku yang berperikemanusiaan, pemeliharaan dan penghargaan terhadap perbedaan dalam bingkai persatuan Indonesia, berkerakyatan yang disimpul dalam semangat demokrasi untuk mencapai mufakat dan perlakuan yang berkeadilan demi kesejahteraan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, penyebaran pemaknaan dari setiap sila di dalamnya mengandung korelasi kebangsaan Indonesia dalam urutan sila-sila lainnya. Internalisasi ontologis pemaknaan setiap sila dalam Pancasila, menerangkan hakikat adanya Tuhan sebagai *causa prima* eksistensi kemanusiaan. Penerapan maknanya menjadi jelas, di mana manusia "ada" karena ada yang mengadakannya dari ketiadaan atau adanya manusia sebagai akibat adanya Tuhan (sila pertama). Eksistensi manusia pada tataran konsep diadakan dari ketiadaan oleh yang mengadakan serta mengikhtiarkan bahwa manusia sebagai makhluk ber-Tuhan merupakan subjek pokok pendukung kehidupan bernegara, karena didasarkan pada logika eksistensial bahwa keberadaan negara merupakan wujud adanya manusia yang melembaga dalam kelompok kemanusiaan. Dengan demikian, negara dimaknai sbagai ekspresi keberadaan manusia yang melembaga dalam bangunan persekutuan hidup bersama yang hakiki (sila kedua).

Logika instrumentalnya di mana adanya negara sebagai akibat eksistensi manusia yang disatukan dalam kelompok (sila ketiga), membentuk persekutuan hidup bersama dalam keberagaman yang dilembagakan dalam negara dan menjadi bagian inti yang disebut rakyat. Rakyat diposisikan sebagai salah satu dimensi inti negara selain wilayah dan struktur pemerintahan. Eksistensi rakyat dimaklumkan dalam totalitas keberadaan individu-individu yang menyatu dalam lembaga negara (sila keempat). Keberadaan manusia yang melembaga tentu menuntut perlakuan keadilan yang populis sehingga tercapai tujuan bersama yaitu keadilan yang menyejahterakan (sila kelima) yang pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara. Kedua, hubungan kesatuan sila-sila Pancasila saling melengkapi dan mengkualifikasi

sebagaimana rangkaian hubungan yang hierarkis pyramidal sehingga setiap sila dikualifikasi dalam kekukuhan dukungan dalam penegasan empat sila lain.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah hakikat Ketuhanan dalam kedalaman jiwa spiritual manusia yang terekspresi dalam perlakuan terhadap sesama yang berkemanusiaan, adil dan beradab, yang dipersatukan dalam kebinekaan Indonesia, yang berkerakyatan dalam pemufakatan untuk menemukan kebijaksanaan keputusan, yang melahirkan pedoman yang mengedepankan perlakuan yang berkeadilan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang diimplementasikan ke dalam sikap adil dan beradab adalah hakikat manusia yang terpanggil karena memiliki kesadaran iman bahwa perlu saling menghargai sebagai sesama ciptaan yang secitra Allah. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, mengukuhkan keberagaman dalam semangat persatuan dalam hidup bernegara, yang dibangun dalam eksistensi berkerakyatan yang diarahkan untuk mencapai kebijaksanaan melalui permusyawaratan/perwakilan yang demokratis, sehingga terwujud tujuan keadilan dalam kehidupan rakyat Indonesia.

Sila ketiga, persatuan di tengah keberagaman Indonesia adalah penguatan untuk menghargai perbedaan melalui sikap persatuan sebagai sesama makhluk yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan diperjuangkan kehidupan bersama yang berkemanusiaan melalui sikap adil dan keadaban, berkerakyatan dalam kehidupan bernegara melalui sikap demokratis untuk menyatukan pemikiran melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang bijaksana, dan yang berdampak pada pedoman hidup yang berkeadilan dalam penerapan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan dalam semangat demokrasi untuk memimpin dan menyatukan pikiran yang melahirkan keputusan penuh kebijaksanaan dalam sebuah musyawarah bersama dan menyadari bahwa kerakyatan dalam hidup bersama saling menghargai sebagai sesama makhluk yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjamin nilai berkemanusiaan yang adil dan hidup yang beradab sehingga semua perbedaan dipersatukan dalam bingkai kehidupan Indonesia serta seluruh warga negara diperlakukan sama secara berkeadilan sosial. Sila kelima, keadilan sosial untuk kepentingan seluruh rakyat sebagai perwujudan kesadaran untuk memperlakukan sesama secara adil karena sesama adalah makhluk ciptaan Allah dalam iman dan keyakinan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, memperlakukan sesama dalam penegakkan aspek berkemanusiaan yang secara adil dan hidup yang beradab, berkerakyatan dalam menyatukan perbedaan untuk menghasilkan sebuah nilai hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang demokratis.

Hakikat kelima sila Pancasila menjadi keutuhan yang satu dan kokoh mencakup dua hal. *Pertama*, Pancasila dalam susunan rumusan merupakan dimensi majemuk dan tunggal (kesatuan organis), yaitu: (1) bagian-bagian yang menyatu dan terintegrasi secara tidak terpisah; (2) tiap bagian bersifat otonom dalam fungsi dan kedudukan; (3) meskipun memiliki keberagaman dalam perbedaan tetapi tidak bertentangan untuk saling melengkapi; (4) bersatu agar tercipta keseluruhan hidup yang berkemanusiaan, adil, dan beradab; (5) keseluruhan membentuk unsur yang menyatukan bagian-bagian; dan (6) tidak saling meniadakan dan menggeser makna dari setiap sila sehingga membentuk kesatuan utuh. Kedua, tersusun secara hierarkis-piramidal (kesatuan bertingkat). Hakikat susunan hierarkis-piramidal Pancasila dideskripsikan sebagai berikut. (1) Sila pertama mencakup dan menginspirasi makna sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. (2) Sila kedua diinspirasi dan dimaknai dukungan oleh sila pertama, mencakup dan menginspirasi sila ketiga, keempat dan kelima. (3) Sila ketiga diinspirasi dalam spirit yang terkandung dalam sila pertama, kedua, dan diinspirasi pula melalui spirit sila keempat dan kelima. Sila keempat tercakup dan terinspirasi dalam pemaknaan jiwa sila pertama, kedua, ketiga dan meliputi

pula sila kelima. Sila kelima diliputi dan diinspirasi serta dijiwai seluruh sila-sila yang kesatuan yang utuh.

Konsep Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 mengikhtiarkan paham negara persatuan, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia yang mengedepankan beberapa aspek: (1) Sosialitas – religiusitas-humanistik; (2) kekeluargaan dan kebersamaan yang utuh; (3) persatuan dalam keberagaman; (4) musyawarah dalam semangat demokrasi untuk menemukan dimensi hikmat dan kebijaksanaan; dan (5) memperjuangkan keadilan sosial demi kesejahteraan Bersama. Gagasan pokok ikhtiar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat ditelisik dari dimensi keseimbangan pemaknaan sila-sila Pancasila yang mencakup: (1) keseimbangan relasi yang toleran dalam memperjuangkan kepentingan antar golongan agama dan golongan nasionalis; (2) keseimbangan dalam memandang dan memahami eksistensi manusia sebagai makhluk paradoksal yang otonom dan sosial (aliran monodualisme); keseimbangan antara gagasan ide-ide awal berdirinya Indonesia dan perkembangan yang telah membaur dengan budaya luar melalui proses asimilasi, akulturasi, dan inkulturasi bernegara (faham dialektis); (3) paham integralistik (paham negara persatuan), diperkokoh melalui penanaman nilai-nilai dasar untuk menciptakan iklim kekeluargaan, yang mencakup: (a) persatuan dan kesatuan yang kokoh dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis; (b) bertekad dan memiliki kehendak yang sama untuk memperjuangkan hidup yang berwawasan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; (c) cinta pada tanah air dan bangsa yang dipupuk dalam semangat kebersamaan; (d) kedaulatan rakyat dalam pemufakatan berbasis sikap demokratis dan toleran; (e) kesetiakawanan sosial, adil, dan tanpa diskriminasi; (f) berkeadilan sosial untuk menggapai tujuan hidup bersama yaitu kesejahteraan yang merata dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban; (g) mempertegas aspek kebinekaan global bahwa bangsa Indonesia berada dalam tata pergaulan dunia yang kompetitif; dan (h) penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan secitra Allah.

## SIMPULAN

Mencermati berbagai dinamika kehidupan manusia yang multidimensional baik dalam bidang politik maupun ideologis, baik pada tataran lokal, nasional, dan global, seyogyanya mengikhtiarkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat penting dimaknai untuk mempertegas pembentukan karakter nasionalisme dalam diri peserta didik. Kemajemukan akibat keberagaman masyarakat Indonesia dalam berbagai dinamika kehidupan yang kian kompleks, terfragmentasi, dan disintegratif untuk mempertegas fakta bahwa tatanan dan struktur politik nasional dan lokal semakin tidak memiliki arah dan tujuan pasti untuk dicapai. Mengatasi kegelisahan ini, penting dan mendesak ditelisik pemaknaan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam memperkokoh dan menggugat dimensi epistemologis Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan pada tataran global sebagai pengejawantahan nilai kebinekaan global. Pancasila perlu kembali ditegakkan dan ditempatkan dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara. Pada tataran praksis refleksi filosofis Pancasila mengafirmasi bahwa Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia, karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh *the founding fathers* Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem. Alasannya karena Pancasila dibangun dan berakar pada manusia Indonesia dengan seluruh suasana kebatinan yang dimiliki sebagai pijakan inspiratif menyelesaikan masalah hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agboola, A. & Tsai K. C. (2015). Bring character education into the classroom. *European Journal of Educational Research*, 1(2), 163-170.
- Al Inu, A. N. N. & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan di masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 259-267.
- Arafat, Y. (2021). Implementasi nilai-nilai Pendidikan Pancasila pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 1(2), 111-122.
- Aryani, E. D., Fadjarin, N., Azzahro, T. A., & Fitriyono, R. A. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(3), 1-13.
- Dewantara, K. H. (1977). *Pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Taman Peserta didik.
- Drijarkara. (1977). *Percikan filsafat*. (R. Hardawiryana, Trans.). Compusius.
- Effendi, Y. R. (2020). Pendekatan kepemimpinan transformasional kepala sekolah berbasis nilai-nilai budaya, humanistik, dan nasionalisme dalam penguatan pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 161-179.
- Effendi, Y. R. (2021). Kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam pengimplementasian program pendidikan karakter di era global. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan (JDMP)*, 6(1), 17-32.
- Effendi, Y. R., & Sahertian P. (2022). Principals' transformational leadership in strengthening character education at senior high school level (SMA) in Indonesia. *South African Journal of Education*, 4(2), 1-11.
- Hartoko, D. (1989). *Memanusiakkan manusia muda*. Gunung Mulia.
- Ida, R., Myta, W. J. B., Kurniawaty, F., & Santyo, W. (2022). Implementasi nilai-nilai Pendidikan Pancasila melalui kegiatan wisata bhinneka pada mahasiswa. *Jagddhita: Jurnal Kebhinekaan dan Wawasan Kebangsaan*, 2(1), 53-67.
- Junaedi (2018). Pancasila sebagai sistem filsafat dalam penerapan konsep negara hukum Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(3), 97-108.
- Kaelan, M. S. (2013). *Negara kebangsaan Pancasila: Kultural, historis, filosofis, yuridis dan aktulisasinya*. Paradigma.
- Kleden, I. (1987). *Sikap ilmiah dan kritik kebudayaan*. LP3ES.
- Koesoema, D. A. (2015). *Character education strategy, mental revolution in educational institutions*. Kanisius.
- Marcel, G. (1949). *The philosophy of existence*. (M. Harri, Trans.). The Camelot Press.
- Notonagoro. (1974). *Dasar falsafah negara*. Pantjuran Tudjuh.
- Perry, A., & Hammond, N. (2002). Systematic reviews: The experiences of a PhD student. *Psychology Learning & Teaching*, 2(1), 32-35. <https://doi.org/10.2304/plat.2002.2.1.32>
- Pring, R. (2005). *Philosophy of education*. Continuum.
- Rahman, A., & Suharno, S. (2020). Pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran politik peserta didik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282-290.
- Semadi, Y. P. (2019). Filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia menuju bangsa berkarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(2), 82-89.
- Suryatni, L. (2016). Filsafat Pancasila dan filsafat hukum sebagai dasar rule of moral. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 53-70.